UPAYA PEMERINTAH CINA DALAM MENGATASI *EAST TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT* (ETIM) PASCA SERANGAN TIANMEN SQUARE

Habibah Abdaliah[1]

Abstract: *This study aims to analyze and describe the efforts made by the Chinese Government in overcoming the East Turkistan Islamic Movement (ETIM) after the Tiananmen Square attack in 2013. The research method used is descriptive with secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The concepts used are terrorism and counter-terrorism. The results of this study shows that the efforts of the Chinese Government are divided into internal efforts and external efforts. The internal efforts made by Chinese Government include affirmation of the PRC's Criminal Law and ratification of the PRC's own Counter-terrorism Law; enhance law enforcement operations in Xinjiang; general public assistance; promoting ethnic unity and fighting religious extremism, and; promoting economic growth. In addition to internal efforts, external efforts were also carried out by the Chinese Government in collaboration with an international organisation, that is Shanghai Cooperation Organisation (SCO)*

Keywords: ***China, Terrorism, Counter-terrorism, East Turkistan Islamic Movement***

Pendahuluan

Cina merupakan salah satu negara yang menganut sosialisme dalam sistem politiknya. Rezim nondemokratis atau *illiberal* seperti sosialisme yang diterapkan di Cina ini tidak memiliki karakteristik melindungi kebebasan umum sipil seperti hak hukum hingga pengadilan yang adil dan kebebasan berekspresi, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan media (Wright, 2001). Konsekuensi dari sistem politik sosialis ini antara lain adalah terbatasnya hak-hak warga negara karena tidak memiliki karakteristik-karakteristik yang sudah disebutkan di atas yang kemudian akan menyebabkan protes serta kerusuhan. Protes-protes yang terjadi di Cina tidak hanya dilakukan untuk mencapai penerapan sistem demokrasi di Cina, namun juga dilakukan sebagai bentuk protes atas penindasan terhadap budaya dan hak minoritas, diskriminasi sosial, atau ketidakseimbangan ekonomi. Protes atas penindasan terhadap budaya dan hak minoritas salah satunya terjadi di daerah otonomi Xinjiang (Dautcher dalam Starr (ed), 2004).

Xinjiang merupakan wilayah otonomi di Cina yang dihuni oleh etnis Uyghur, yang fisiknya menyerupai bangsa Turki dan juga berkomunikasi menggunakan bahasa Turki. Uyghur di Xinjiang merupakan komunitas muslim terbesar di Cina setelah etnis Hui (Wang, 2003). Mayoritas dari etnis Hui bermukim di wilayah otonomi Ningxia Hui yang meliputi sepertiga dari 5.62 juta populasi yang ada di wilayah otonomi tersebut. Terjadi beberapa pelarangan di Xinjiang terhadap kebebasan beragama suku Uyghur, pelarangan terhadap kebebasan beragama yang dimaksud juga termasuk pelanggaran beberapa Hak Asasi Manusia (HAM), seperti penangkapan sewenang-wenang, penutupan tempat ibadah, penindakan keras terhadap kegiatan keagamaan, dan larangan

[1] Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : habdalia@yahoo.com

praktik keagamaan pribadi di institusi pemerintah (kantor administrasi, sekolah, dan perusahaan) (Becquelin, 2004)

Pemerintah Cina menilai bahwa masyarakat Muslim Uyghur beraliran radikal, sedangkan Muslim Hui adalah muslim yang lebih konservatif, sehingga pelaksanaan kegiatan rohani di Xinjiang perlu dibatasi (Reed dan Raschke, 2010). Dapat diketahui bahwa radikalisme didefinisikan sebagai keinginan untuk reformasi atau revolusi inovatif yang cepat, mendalam, dan menyeluruh. Sedangkan para konservatif cenderung menerima dengan tenang dan menyetujui hal-hal sebagaimana adanya (Wolfe, 2014). Pembatasan kebebasan beragama ini adalah imbas dari Republik Turkistan Timur Pertama (merupakan Republik Islam yang didirikan pada tahun 1933 dengan pusatnya berada di Kashgar, yang sekarang wilayah otonomi Xinjiang) pada periode 1930-an yang mencetuskan slogan "*protect religion, kill the Han, and destroy the Hui*." (Lee, 2006).

Dampak dari terjadinya berbagai pelarangan-pelarangan atas kebebasan HAM di Xinjiang menuntun kepada pemberontakan masyarakatnya. Pergerakan dari para nasionalis-separatis di Xinjiang kemudian tumbuh. Salah satunya adalah pergerakan yang dilakukan oleh *East Turkistan Islamic Movement* atau *East Turkistan Islamic Party* atau yang biasa disebut sebagai ETIM (Reed dan Raschke, 2010).

Pemerintah Cina mengkategorikan tindakan separatisme etnis, terorisme, dan ekstremis religius sebagai *three evils*. ETIM sudah termasuk ke dalam kategori *three evils*, karena ETIM digerakkan oleh semangat separatisme etnis yaitu etnis Uyghur yang ingin memerdekakan wilayah otonomi Xinjiang dari Cina, dengan melakukan tindakan terorisme. Selain digerakkan oleh semangat separatisme etnis, ETIM juga digerakkan oleh para ekstremis religius, karena mayoritas masyarakat Uyghur di Xinjiang beragama Islam dan ingin membentuk negara Islam di Xinjiang (Wang, 2003).

ETIM juga termasuk ke dalam organisasi dengan pergerakan nasionalis-separatis, yang kemudian berubah menjadi terorisme karena tindakan politik yang mereka lakukan gagal, namun seperti yang diungkapkan oleh seorang sejarawan bernama Walter Laqueur (Laqueur, 1999), tindakan terorisme merupakan tujuan pertama yang dipilih oleh kelompok nasionalis-separatis karena dengan melakukan itu maka tujuan mereka akan cepat pula terlaksana.

Pemerintah Cina telah lama menyebut ETIM sebagai kelompok teroris, yaitu pasca peristiwa 11 September 2001 atau 9/11 (Reed dan Raschke, 2010). Pada saat peristiwa tersebut ETIM memiliki koneksi atau telah beraliansi dengan Al Qaeda dan Osama Bin Laden (Xu et.al, 2014). ETIM merupakan sekutu Al Qaeda yang paling menonjol di Xinjiang (Wayne, 2008). Hal ini bertepatan dengan Amerika Serikat yang mengkampanyekan *War on Terrorism* atau Perang terhadap Terorisme, dan Cina tanpa ragu turut terlibat dan mendukung kampanye *War on Terrorism* yang digagas oleh George W. Bush Jr. tersebut (US Department of State, 2002).

ETIM tercatat telah melakukan serangkaian penyerangan sejak tahun 1990an, baik di dalam Cina maupun di luar Cina. Pada tahun 2008, saat Cina menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas, ETIM melakukan serangkaian pengeboman bis di Kunming dan serangan pada pasukan paramiliter di Kashgar yang menewaskan 17 petugas (Reed dan Raschke, 2010). Pada tahun 2010 dua militan ETIM ditangkap di Dubai karena merencanakan pengeboman di pusat perbelanjaan (Pantucci, 2010).

Peristiwa di Tiananmen Square pada tanggal 28 Oktober 2013 adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh militan ETIM. Hal ini diakui oleh pemimpin ETIM yaitu Abdullah Mansour yang merilis sebuah klip audio berdurasi delapan menit terkait

peristiwa Tiananmen Square pada tahun 2013 tersebut sekaligus memperingatkan serangan yang akan datang di Cina, berikut potongan pernyataan oleh Abdullah Mansour (Kaiman, 2013): "*O Chinese unbelievers, know that you have been fooling East Turkistan for the last sixty years, but now they have awakened… The people have learned who is the real enemy and they returned to their religion … They learned the lesson*."

Kronologi peristiwa ini dimulai pada saat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi memasuki halaman Tiananmen Square yang kemudian meledakkan bom bunuh diri di dalam mobil tersebut dan akhirnya menyebabkan 5 korban tewas dan 40 orang terluka (Xu et.al, 2014).

Pasca serangan yang terjadi di Tiananmen Square pada tahun 2013, Hua Chunying, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyebut kejadian tersebut sebagai ancaman keamanan yang paling realistis dan langsung terhadap Cina (Rajagopalan, 2013). Pemerintah Cina sebelumnya telah berupaya untuk memperbaiki HAM di negaranya dengan turut berpartisipasi dalam rezim HAM internasional dan telah menandatangani perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM seperti *United Nation Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and the Commission on the Elimination of Racial Discrimination*, dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discriminations* (Chen, 2009). Selain tergabung dalam rezim HAM internasional, Cina sebelumnya juga telah berupaya dalam pembangunan ekonomi di Xinjiang. Pemerintah Cina memperkuat dan memperbaiki infrastruktur, terutama jalur pipa dan jalur kereta api untuk menyediakan akses untuk mengirim sumber daya alam (Wong-Tworek, 2015).

Kerangka Teori

Konsep Terorisme

Viotti dan Kauppi mengemukakan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan yang bermotivasi politik dengan tujuan untuk memberikan efek kekacauan pada masyarakat dan pemerintah (Viotti dan Kauppi, 2007). Dengan kekerasan, teroris dapat menyebarkan rasa takut serta mengancam bagi setiap masyarakat, pemerintah maupun negara. Selain itu, tindakan terorisme juga dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir serta dilakukan oleh kelompok subnasional atau non-state actor.

Viotti dan Kauppi juga menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penyebab mengapa terorisme bisa terjadi, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Psikologis/Sosial-Psikologis
   Faktor ini fokus kepada pengalaman yang dimiliki oleh para teroris tersebut, seperti pengalaman masa lalu tentang orangtua yang kasar lalu seperti ketika seseorang merasa terasingkan dari dunia sekitarnya, maka inilah yang menyebabkan terorisme terjadi.
b. Faktor Ideologis
   Dengan penjelasan bahwa teroris itu merupakan 'true believers', maka mereka berpikir bahwa masyarakat yang baik itu bisa diciptakan dengan menghilangkan hambatan atau ancaman tertentu, setiap ideologi memiliki ancaman yang berbeda-beda. Misalnya penganut ideologi nasionalis, maka ancamannya adalah kolonialis, sedangkan untuk fasis ancamannya adalah kelompok minoritas atau imigran asing. Lalu ancaman ideologi ekstremis-religius adalah bukan hanya terhadap orang asing, namun nilai-nilai yang mereka bawa yang mengancam budaya asli. Seperti yang terjadi pada

jaringan teroris Al Qaeda, bahwa mereka tidak hanya melawan Amerika dan pengaruh Barat dan kehadiran Barat di Timur Tengah, namun juga melawan kekuatan globalisasi yang merendahkan masyarakat Islam serta cara hidup mereka.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan membawa dua kategori yang mampu menjelaskan lebih dalam mengapa terorisme bisa terjadi; (1) keluhan dan (2) budaya kekerasan. Contoh untuk keluhan adalah seperti yang terjadi di Lebanon pada 1976. Saat itu Muslim Lebanon merasa menderita karena kurang terwakilkannya suara mereka di pemerintahan dan diskriminasi yang mereka dapat dari para orang Kristen Lebanon, sehingga memunculkan kekerasan/teror. Lalu budaya kekerasan, yang mengacu kepada masyarakat yang mengalami kekerasan interkomunal level tinggi bertahun-tahun sehingga kekerasan interkomunal tersebut menjadi norma

Konsep Kontra-Terorisme

Menurut kamus Merriam Webster, definisi dari kontra-terorisme adalah langkah-langkah yang dirancang untuk memerangi atau mencegah terorisme. Kontra-terorisme juga bisa diartikan sebagai tindakan oleh kelompok ataupun tentara yang dilakukan untuk mencegah serangan teroris dan menghancurkan jaringan teroris.

Viotti dan Kaupp juga mengungkapkan bahwa terdapat empat cara untuk merespon terorisme, yaitu (Viotti dan Kauppi, 2007):

a. Menghilangkan Penyebab Terorisme yang Mendasar.

Pendekatan ini berpendapat bahwa keluhan adalah yang berada di jantung permasalahannya. Banyaknya kemiskinan dan penyakit sosial akan selalu memberikan ketidakpuasan politik, yang dapat dimanfaatkan untuk kekerasan teroris seperti yang merupakan inti dari gerakan seperti ETIM. Namun, tidak ada jaminan bahwa terus memberikan apa yang mereka tuntut akan membuat mereka mengurangi penggunaan tindakan terorisme.

b. Serangan Balik terhadap Terorisme.

Pendekatan ini membutuhkan serangan militer terhadap organisasi teroris dan negara-negara yang mendukungnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa penggunaan kekuatan militer akan menghilangkan basis teroris atau berfungsi untuk mencegah serangan teroris lebih lanjut. Namun, pendekatan ini bukan tanpa kesulitan. Pembuat kebijakan harus memperhitungkan beberapa kesulitan yang ada. Pertama, inteligensi luar biasa dibutuhkan untuk melacak anggota kelompok teroris karena menempatkan seorang agen ke dalam kelompok teroris bukanlah hal yang mudah. Kelompok teroris biasanya tidak menerima anggota secara terbuka dan proses seleksinya juga ketat. Pelacakan melalui satelit bisa dilakukan namun akan terbatas dalam menemukan teroris yang berada di lingkungan kota. Ketika pemerintah menggunakan teknologi hanya untuk mencari dan menargetkan kelompok teroris maka ada risiko besar kesalahan dengan konsekuensi yang tidak diinginkan, dan bisa merugikan bagi kelompok non-teroris. Yang kedua, jika pemerintah bisa melacak teroris, operasi militer yang dirancang untuk menyingkirkan kelompok teroris tersebut akan menghadapi tantangan taktis dan politik dalam pelaksanaannya.*m*Lalu yang terakhir adalah tindakan militer yang secara

khusus mengarah kepada negara-negara yang mendukung atau terlibat dalam terorisme internasional dapat mengakibatkan balasan dan eskalasi.

c. Memaksakan Aturan Hukum.

Menurut banyak pengamat, poin ini adalah pilar yang paling penting dari semua kebijakan efektif anti-teroris internasional. Sejarah terlalu sering memperlihatkan bahwa atas nama 'memerangi terorisme' atau subversi, keadaan darurat sementara kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang diktatorial. Pemerintah dapat melaksanakan aturan hukum dalam dua cara mendasar yaitu melalui upaya domestik unilateral dan upaya kerja sama internasional.

d. Mendorong Kerja Sama Internasional.

Yang lebih penting daripada perjanjian hukum yang formal adalah beberapa upaya di antara negara-negara untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam perjuangan melawan terorisme. Progres diplomatik seringnya dilakukan dengan seksama dan membutuhkan kesabaran dan ketekunan besar, namun bisa mengurangi penggunaan terorisme oleh beberapa kelompok. Kerja sama bisa dilakukan dengan bentuk yang berbeda-beda seperti dukungan diplomatik untuk upaya kontra-terorisme negara lain, operasi militer gabungan, berbagi inteligensi, kerja sama penegakan hukum, atau bantuan dan pelatihan keamanan

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Cina. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah document-based research dan internet-based research dengan mencari sejumlah literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dalam bentuk content analysis yang menganalisis isi dari sumber-sumber yang didapat dan menjelaskan dengan kerangka konseptual yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Ancaman keamanan yang disebabkan oleh ETIM di Cina akhirnya membuat Pemerintah Cina memberikan respon dengan melaksanakan berbagai upaya yang dirasa mampu meminimalisir pergerakan ETIM. Dijelaskan di dalam White Paper tahun 2016 mengenai Kontra-Terorisme dan Ekstremisme serta Perlindungan HAM di Xinjiang (The State Council Information, 2019), bahwa pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada perlindungan HAM dalam upaya kontra-terorisme dengan menjaga kegiatan kontra-terorisme agar tetap berada dalam hukum dan menghukum tindakan terorisme sesuai dengan hukum serta memastikan bahwa langkah-langkah kontra-terorisme tidak melanggar hak-hak dasar, kepentingan, dan kebebasan kelompok etnis.

Upaya Internal

a. Penegasan UU Pidana dan Pengesahan UU Kontra-Terorisme

Dalam *White Paper* yang dikeluarkan Pemerintah Cina pada 18 Maret 2019 mengenai kontra-terorisme dan perlindungan HAM di Xinjiang, dijelaskan bahwa penanggulangan terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang selalu dilakukan sesuai dengan

hukum. Saat ini, sistem hukum kontra-terorisme Cina terdiri dari Konstitusi RRC; UU/Hukum Pidana RRC; Hukum Acara Pidana RRC; Hukum Keamanan Nasional RRC; UU Kontra-Terorisme RRC; Peraturan Urusan Agama, dan; Pendapat tentang Masalah-Masalah Tertentu Mengenai Penerapan Hukum dalam Menangani Kasus Pidana yang Melibatkan Terorisme dan Ekstremisme yang dikeluarkan bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Rakyat, Kementerian Keamanan Publik, dan Kementerian Kehakiman (The State Council Information Office, 2019).

Meskipun jejak terorisme di Cina bisa ditelusuri sejak 1980an, Pemerintah Cina tidak memiliki definisi resmi mengenai jenis kegiatan apa yang merupakan tindak terorisme. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Pemerintah Cina dalam Amandemen Kesembilan pada UU Pidana 2015. Selain menambahkan mengenai jenis kegiatan terorisme pada Amandemen Kesembilan tersebut, UU Kontra-terorisme RRC tahun 2015 kemudian disahkan (Tanner dan Bellacqua, 2016).

Amandemen Kesembilan UU Pidana RRC yang disahkan sebelum UU Kontra-terorisme diselesaikan, mendefinisikan aplikasi hukum dan hukuman untuk banyak aksi teroris dan ekstremis. UU Pidana yang telah diamandemen kini berpotensi menghukum banyak kegiatan teroris termasuk kegiatan pendidikan dan sosial, kepemilikan buku dan materi audio-visual, dan bahkan pakaian (Tanner dan Bellacqua, 2016). Seperti yang tertulis dalam Pasal 120 dalam UU Pidana yang telah diamandemen, yaitu sebagai berikut: "*Siapa pun yang membentuk, memimpin atau berpartisipasi secara aktif dalam organisasi teroris harus dihukum penjara jangka tetap tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun; individu terkait yang lain akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun, penahanan pidana atau pengawasan publik. Siapa pun, selain kejahatan yang disebutkan sebelumnya, melakukan kejahatan pembunuhan lainnya, ledakan atau penculikan akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukuman gabungan untuk beberapa kejahatan.*" (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015)

Sejak 2015 hingga amandemen terbaru yaitu 4 November 2017, dalam UU Pidana RRC, *National People's Congress*/Kongres Rakyat Nasional (NPC) telah mendefinisikan jenis kegiatan terorisme. Pasal 3 dalam UU Kontra-Terorisme Tahun 2015 menjelaskan kegiatan yang bersifat teroris, di antaranya adalah:

1. Kegiatan yang secara serius membahayakan masyarakat seperti pengorganisasian, perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan yang dapat menyebabkan cedera pada individu, kerusakan besar pada properti, kerusakan fasilitas publik, atau kekacauan dalam ketertiban umum;
2. Mengadvokasi terorisme, menghasut orang lain untuk melakukan kegiatan teroris, secara tidak sah memiliki barang-barang yang mendukung terorisme, atau memaksa orang lain untuk memakai atau mengenakan pakaian atau simbol yang menganjurkan terorisme di tempat umum;
3. Mengorganisir, memimpin, atau berpartisipasi dalam organisasi teroris;
4. Memberikan informasi, modal, pendanaan, tenaga kerja, teknologi, tempat atau dukungan lain, membantu atau memfasilitasi organisasi teroris, personel kegiatan teroris, atau komisi kegiatan teroris;
5. Kegiatan teroris lainnya (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015)

Dalam Pasal 4 dan 8 UU Kontra-Terorisme ini juga dijelaskan bahwa kontra-terorisme telah masuk ke dalam strategi keamanan nasional dan menggunakan cara-cara

politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, diplomatik, dan militer untuk melakukan upaya kontra-terorisme. Organ keamanan publik, keamanan nasional, kejaksaan dan pengadilan dan organ terkait lainnya harus melakukan upaya kontra-terorisme dengan baik sesuai dengan pembagian kerja. PLA, *People's Armed Police*/Pasukan Polisi Bersenjata Rakyat Cina (PAP), dan organisasi milisi rakyat mencegah dan menangani kegiatan teroris di bawah pengerahan lembaga-lembaga terkemuka untuk upaya-upaya kontra-terorisme dan mengikuti UU Kontra-Terorisme dan UU lain yang relevan, peraturan administrasi, peraturan militer, dan keputusan dari Dewan Negara dan Komisi Militer Pusat. (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015)

b. Meningkatkan Operasi Penegakan Hukum di Xinjiang

Xinjiang dipandang sebagai salah satu tantangan keamanan terbesar di Cina dan dicirikan sebagai medan pertempuran utama dalam upaya kontra-terorisme. Selain itu, Xi Jinping juga menggambarkannya sebagai *frontline* atau garis terdepan perjuangan Cina melawan terorisme (Tanner dan Bellacqua, 2016).

Pemerintah Cina melaksanakan kampanye '*Strike Hard*' sejak 1996 di Xinjiang dan kemudian dilakukan secara berkala yang dirancang untuk menindak terorisme, separatisme, dan perilaku kriminal serta menyita senjata dan bahan peledak ilegal. Kampanye ini juga dijalankan di Tibet. Pada 25 Mei 2014, kampanye ini dilakukan tiga hari setelah serangan mematikan di Urumqi yang menewaskan 32 orang dan melukai 90 orang serta digambarkan sebagai upaya untuk menindak elemen teroris di Xinjiang.

Menurut Mahkamah Rakyat Cina, penangkapan dan hukuman atas tuduhan terkait terorisme meningkat selama kampanye tersebut. Pengadilan Cina di seluruh negeri menangani 14.8% lebih banyak kasus terorisme dan dakwaan separatisme pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013, dan menghukum orang atas dakwaan ini 13% lebih banyak dibanding tahun sebelumnya (Tanner dan Bellacqua, 2016). Pemerintah Cina juga menggunakan eksekusi sebagai bagian dari kampanye, meskipun data mengenai jumlah total eksekusi untuk hukuman ini serta biaya lainnya di Cina tidak diketahui. Namun, portal berita Xinhua melaporkan kasus yang melibatkan setidaknya 21 eksekusi pada tuduhan yang berkaitan dengan terorisme di Xinjiang selama tahun 2014.

Enam bulan setelah kampanye ini dijalankan, terdapat lebih dari seratus sel/jaringan teroris telah dihilangkan di Xinjiang dan dipastikan bahwa sebagian besar serangan teroris di Xinjiang dicegah sebelum terlaksana (Tanner dan Bellacqua, 2016). Selain kampanye '*Strike Hard*', untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan teroris, Pemerintah Cina juga melaksanakan latihan kontra-terorisme sebanyak enam kali dan memberikan pelatihan profesional kepada lebih dari 2.500 personel selama tahun 2016 (Yi, 2016). Pada awal tahun 2017 perekrutan pasukan polisi meningkat, sejalan dengan upaya untuk membangun hampir 7.500 kantor polisi di seluruh wilayah untuk menstabilkan Xinjiang dengan peralatan keamanan.

Upaya sekuritisasi ini juga mengacu pada pengembangan teknologi seperti jaringan pengawasan menggunakan pengenalan wajah, pengumpulan data biometrik warga negara, dan pelacakan GPS kendaraan pribadi (Doyon, 2019).

c. Bantuan Masyarakat Umum

Sesuai dengan Pasal 9 dan 17 dari UU Kontra-Terorisme yang ada, dijelaskan bahwa semua unit dan individu memiliki kewajiban untuk membantu dan bekerja sama

dengan otoritas pemerintah terkait dalam melakukan upaya kontra-terorisme dan ketika menemukan dugaan kegiatan teroris atau orang-orang yang diduga teroris maka harus segera dilaporkan ke organ-organ keamanan publik atau departemen terkait, dan juga komite desa serta komite warga harus membantu pemerintah dan departemen terkait dalam memperkuat publisitas dan pendidikan kontra-terorisme (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015).

Setelah serangan di Urumqi tahun 2014, Sekretaris PKC menyerukan '*people's war*' yang mencakup langkah-langkah keamanan tinggi dan kampanye untuk mengatur kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Kampanye ini melibatkan mobilisasi penduduk lokal untuk membantu pihak berwenang dengan memberikan tip tentang tersangka teroris (Tanner dan Bellacqua, 2016).

Selain Pasal 9, bunyi Pasal 10 UU Kontra-Terorisme tahun 2015 juga menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan negara, pemerintah akan memberikan kontribusi untuk setiap pelaporan kegiatan teroris atau untuk bantuan yang diberikan dalam pencegahan kegiatan teroris (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015).

Pemerintah Xinjiang menawarkan hadiah uang tunai sebagai balasan atas informasi yang menuntun pada penangkapan terduga teroris sebagai bagian dari kampanye '*Strike Hard*'. Setelah serangan teroris pada tahun 2014 di Shache, otoritas setempat dilaporkan memobilisasi 30.000 relawan di lima desa untuk memimpin pencarian teroris skala besar yang diduga merencanakan serangan di taman kanak-kanak sekitar. Pemerintah Xinjiang mengumumkan bahwa mereka akan memberikan hadiah uang tunai total 300 juta Yuan (setara dengan 47 juta Dolar AS) kepada semua relawan yang berpartisipasi dalam pemburuan tersebut (Tanner dan Bellacqua, 2016).

Kepolisian Beijing telah meningkatkan upaya untuk memobilisasi massa dan melawan terorisme. Dua pelapor mendapatkan 3.000 Yuan (sekitar 462 Dollar AS) dan 2.000 Yuan karena telah memberikan informasi mengenai terorisme dan melaporkan barang berbahaya yang saat itu terdapat di kereta bawah tanah. Lebih dari 500 orang telah dihadiahi uang tunai oleh kepolisian Beijing sejak mereka mengumumkan akan memberikan hadiah bagi informan teroris pada Maret 2014. Para pelapor dihadiahi uang tunai sebesar 1.000-40.000 Yuan untuk setiap informasi mengenai terorisme (Yi, 2016).

d. Mempromosikan Persatuan Etnis dan Melawan Ekstremisme Religius

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 29 UU Kontra-Terorisme, bahwa badan-badan keamanan publik harus mengatur departemen terkait, komite penduduk desa, komite penduduk dan tempat kerja, sekolah, keluarga, dan wali untuk melakukan bantuan dan pendidikan bagi orang-orang yang terpapar atau terhasut, dipaksa, atau dibujuk untuk ikut serta dalam kegiatan teroris atau ekstremis, atau orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015).

Sejak tahun 2014 Xinjiang telah menghancurkan 1.588 gerombolan pelaku kekerasan dan teroris, menangkap 12.995 teroris, menyita 2.052 alat peledak, menghukum 30.645 orang karena 4.858 kegiatan keagamaan ilegal, dan menyita 345.229 salinan materi agama ilegal (The State Council Information Office, 2019). *White Paper* yang dikeluarkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara menjelaskan mengenai Perlawanan terhadap Terorisme dan Ekstremisme dan Perlindungan HAM di Xinjiang yang menjelaskan bahwa deradikalisasi berbasis hukum telah diluncurkan di Xinjiang untuk menangani kegiatan keagamaan ilegal, materi agama ilegal, dan

penyebaran agama ilegal melalui internet, yang secara efektif mengekang pertumbuhan dan penyebaran ekstremisme religius. Seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dimana masjid di Xinjiang telah dilengkapi dengan air, listrik, gas alam, fasilitas radio, dan televisi serta perpustakaan. Jalan menuju masjid telah diaspal untuk memudahkan akses, peralatan mandi dan toilet juga telah terdapat di masjid-masjid. Fasilitas lain yang baru dipasang atau ditambahkan ke masjid termasuk layanan medis, layar LED, komputer, kipas angin atau AC, peralatan pemadam kebakaran, fasilitas air minum, dan loker. Melalui upaya deradikalisasi berbasis hukum ini, pemerintah telah menjaga harmoni dan stabilitas sosial (The State Council Information Office, 2019).

Cina telah membangun paling tidak 35.000 masjid, jumlah ini lebih banyak dibandingkan yang dibangun oleh Perancis, AS, dan Britania Raya, yang masing-masing berjumlah 2.300, 2.106, dan 1.600. Banyak yang melaporkan juga bahwa masjid di Xinjiang telah dirubuhkan dalam skala besar.

Seorang peneliti independen bernama Shawn Zhang pernah membuat cuitan pada tanggal 3 April 2019 mengenai Masjid Keriya Etika di Hotan, Xinjiang yang hilang secara tiba-tiba pada awal tahun 2018. Cuitan ini kemudian menjadi perbincangan dan semakin memperkuat dugaan bahwa Cina memang benar-benar telah merubuhkan masjid-masjid yang ada di Xinjiang.

Namun, pada tanggal 23 April 2019 Shawn Zhang menulis klarifikasi mengenai cuitannya yang sempat menjadi perbincangan tersebut. Shawn Zhang menyebutkan bahwa cuitannya tersebut dapat menyesatkan pembacanya. Masjid Keriya Etika adalah masjid tua yang setidaknya telah mengalami enam kali perbaikan dan yang dirubuhkan adalah keseluruhan bangunan *gatehouse* utara, sementara *prayer hall* atau tempat di mana orang-orang beribadah tidak dirubuhkan. *Gatehouse* utara pernah direnovasi pada tahun 1997-1998 dan meskipun di bangunan tersebut terdapat tanda warisan budaya yang dilindungi, Shawn Zhang berasumsi bahwa hanya *prayer hall* saja yang merupakan warisan budaya yang dilindungi dan *gatehouse*-nya tidak.

Dalam klarifikasi Shawn Zhang juga dijelaskan bahwa situasi seperti yang terjadi pada Masjid Keriya Etika juga terjadi pada Masjid Agung Artux (*gatehouse*-nya juga dirubuhkan), Masjid Kargilik (*gatehouse* dan beberapa aula dirubuhkan), Masjid Cherchen (beberapa bagian dirubuhkan), dan paling parah adalah Masjid Aksu yang benar-benar dirubuhkan secara keseluruhan Namun, Mamat Juma, seorang Imam di Masjid Id Kah Kashgar menyatakan bahwa memang benar masjid-masjid telah dirubuhkan di Xinjiang, namun yang dirubuhkan hanyalah yang rusak dan yang nyaris runtuh. Masjid baru telah dibangun sebagai gantinya

Salah satu contoh masjid yang dirubuhkan untuk kemudian direnovasi adalah Masjid Jama di Hotan yang dibangun pada abad ke-19. Imam masjidnya, Obilhasan Tusunniyaz berkata bahwa pada tahun 1997 masyarakat setempat mengeluh karena kondisi masjid tersebut yang membuat Pemerintah Cina menyetujui anggaran tiga juta Yuan untuk proyek rekonstruksi. Saat ini Masjid Jama telah direnovasi penuh dan bahkan dilengkapi dengan pendingin udara, kamar mandi serta pendingin air.

Selain itu, pusat pendidikan dan pelatihan juga telah didirikan di Xinjiang. Terdapat satu pusat pelatihan di Urumqi dan Hami, tiga di Karamay dan Tacheng, empat di Changji dan Bayingolin, lima di Turpan dan Kizilsu, delapan di Aksu, tiga belas di Ili, lima belas di Hotan, dan 34 di Kashgar. Pusat pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi orang-orang yang bersalah atas kejahatan ringan atau melanggar hukum dan untuk memberantas pengaruh terorisme dan ekstremisme. Peserta pelatihan di pusat-pusat tersebut terbagi dalam tiga kategori:

1. Orang yang dihasut/dipaksa untuk berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis, atau orang yang berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis dalam keadaan yang tidak cukup serius untuk membentuk kejahatan;
2. Orang-orang yang dihasut/dipaksa untuk berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis, atau orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau ekstremis yang kesalahannya tidak parah, yang membuat pengakuan dari kejahatan mereka dan menyesal tentang tindakan masa lalu mereka dan dengan demikian dapat dibebaskan dari hukuman sesuai dengan hukum, dan yang telah menunjukkan kesediaan untuk menerima pelatihan;
3. Orang-orang yang dihukum dan menerima hukuman penjara karena kejahatan teroris atau ekstremis dan setelah menjalani hukuman, mereka dinilai masih berpotensi mengancam masyarakat, dan yang telah diperintahkan oleh pengadilan rakyat untuk menerima pendidikan di pusat-pusat tersebut sesuai dengan hukum (The State Council Information Office, 2019: 20).

Sesuai dengan Pasal 29 dan 30 dari UU Kontra-Terorisme, orang-orang dalam kategori pertama dan ketiga akan ditempatkan di pusat-pusat tersebut untuk menerima dukungan dan pendidikan. Untuk orang-orang di kategori kedua, sebagian dari mereka harus dihukum berat, sementara mayoritas lainnya harus direhabilitasi sesuai dengan kebijakan (Criminal Law of the People's Republic of Cina, 2015).

Pusat pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang didirikan sesuai dengan hukum. Mereka memiliki tujuan dan metode pelatihan yang jelas, kriteria untuk penyelesaian program, dan metode penilaian, yang dinyatakan dalam perjanjian yang mereka tandatangani dengan peserta pelatihan. Ketika peserta pelatihan memenuhi standar penilaian, mereka akan diberikan sertifikat kelulusan. Kurikulum pusat-pusat terdiri dari bahasa Cina standar lisan dan tulisan, hukum, keterampilan kejuruan, dan kursus tentang pemberantasan ekstremisme. Guru-guru berkualitas dan pelatih kejuruan senior merumuskan rencana pengajaran, menyusun dan mencetak bahan ajar, dan mengembangkan sistem pengajaran secara terpadu. Pendekatan selangkah demi selangkah telah diadopsi dalam proses studi dan pelatihan, yang dimulai dengan standar belajar bahasa Cina lisan dan tulisan, kemudian beralih ke mempelajari hukum, dan diakhiri dengan belajar keterampilan kejuruan.

Para peserta pelatihan memiliki kesadaran yang lemah akan aturan hukum sehingga pusat-pusat pelatihan menganggap pemahaman hukum sebagai mata rantai utama dalam membantu peserta pelatihan untuk meningkatkan rasa negara, kewarganegaraan, dan aturan hukum mereka. Mereka telah mengundang para hakim, jaksa penuntut umum, dan pengacara untuk memberikan kuliah tentang hukum dan peraturan seperti Konstitusi RRC, UU/Hukum Pidana RRC, Ketentuan Umum Hukum Sipil RRC, Hukum Pernikahan RRC, Hukum Pendidikan RRC, UU/Hukum Kontra-Terorisme RRC, UU Hukuman Administrasi Keamanan Publik RRC, dan Peraturan Daerah Otonomi Xinjiang tentang Deradikalisasi (The State Council Information Office, 2019). Melalui studi, peserta pelatihan telah menyadari bahwa sebagai warga negara mereka memiliki kewajiban untuk tunduk pada konstitusi dan hukum negara dan mereka harus bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan kepada mereka oleh konstitusi dan hukum.

Peserta pelatihan dapat melakukan kunjungan rumah secara teratur dan dapat meminta cuti untuk menghadiri urusan pribadi. Pusat-pusat pelatihan ini dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan budaya baik itu di dalam dan luar ruangan. Pusat pelatihan

ini sepenuhnya menghormati dan melindungi kebiasaan peserta pelatihan dari berbagai kelompok etnis, merawat kesehatan mental mereka, menawarkan layanan konseling psikologis, dan membantu mereka memecahkan masalah kehidupan nyata. Berkat langkah-langkah ini, Xinjiang telah merasakan perubahan nyata dalam lingkungan sosial dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok-kelompok etnis Xinjiang sekarang menikmati hubungan yang lebih dekat dan memiliki rasa kepuasan, kebahagiaan, dan keamanan yang jauh lebih kuat (The State Council Information Office, 2019).

Jumanisa Mahum yang sekarang bekerja sebagai guru sekolah dasar menyatakan bahwa pusat pelatihan dan pendidikan yang ada di Xinjiang meningkatkan kemampuannya dalam membedakan antara legal dan ilegal. Banyak juga yang meningkatkan kesadaran mereka tentang hukum dan keterampilan bernalar. Mereka tidak akan beralih ke pemikiran ekstremis lagi dan Jumanisa Mahum menyimpulkan bahwa dia merasa pusat pelatihan dan pendidikan di Xinjiang sudah tidak diperlukan lagi Semua peserta pelatihan yang berada di pusat pelatihan dan pendidikan di Xinjiang telah dinyatakan lulus seperti yang diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Komite PKC Xinjiang yaitu Shohrat Zakir per awal Desember 2019. Pusat-pusat pelatihan dan pendidikan yang telah tutup nantinya akan difungsikan sebagai sekolah dasar ataupun menengah.

e. Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi

Beijing membuat beberapa inisiatif pembangunan di Xinjiang dengan tujuan untuk melawan sumber ketidakpuasan ekonomi sosial yang dirasakan di wilayah otonomi ini. Beijing berusaha menstabilkan wilayah Xinjiang dengan meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengintegrasikan lebih lanjut Xinjiang dengan pusat ekonomi Cina. Proyek Jalur Sutra tahun 2013 adalah salah satu upaya karena dirancang untuk mengembangkan pembangunan baik itu di Xinjiang maupun Asia Tengah dengan memperluas perdagangan, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan ikatan budaya (Buckow et.al, 2015)

Keuntungan ekonomi tidak terbagi rata di seluruh provinsi Xinjiang. Banyak industri di Xinjiang terkonsentrasi di utara dekat Urumqi, tempat yang banyak dihuni oleh etnis Han. Sebaliknya, wilayah Xinjiang yang mayoritas dihuni oleh etnis Uyghur sebagian besar kering dan tidak memiliki sumber daya alam (Tanner dan Bellacqua, 2016).

Dalam publikasi *White Paper* yang dirilis Kantor Informasi Dewan Negara mengenai Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Xinjiang menjelaskan bahwa berdasarkan permintaan lokal dan peluang pekerjaan, mereka yang berada di pusat pelatihan mempelajari pembuatan garmen, pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, pencetakan, tata rambut dan layanan kecantikan, *e-commerce*, pemeliharaan dan perbaikan mobil, desain dan dekorasi interior, pengembangbiakan ternak, ilmu tentang buah-buahan, terapi pijat, layanan rumah tangga, kerajinan tangan, merangkai bunga, karpet tenun, lukisan, dan seni pertunjukan seperti musik dan tari (The State Council Information Office, 2019). Semua yang dipelajari oleh para peserta pelatihan di pusat pelatihan tersebut kemudian membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan hal ini tentunya berdampak dalam pertumbuhan ekonomi di Xinjiang. Selain berdampak dalam pertumbuhan ekonomi Xinjiang, hal ini meredakan sensitivitas etnis Uyghur terhadap praktik perekrutan kerja yang sebelumnya menurut mereka telah mendiskriminasi etnis Uyghur.

Terdapat sebuah artikel mengenai orang-orang yang pernah masuk ke pusat pelatihan dan pendidikan seperti Abulizikari Aobuli yang menyempurnakan kemampuan melukisnya di pusat pelatihan dan pendidikan dan sekarang bekerja di sebuah galeri, kemudian ada juga Yuregul Yusan yang bekerja di sektor perhotelan, serta Rukiya Yakup yang meningkatkan kemampuan berbahasa Mandarinnya dan sekarang bekerja sebagai agen perumahan Abduriyim Nur, seorang peserta pelatihan yang telah lulus dari pusat pelatihan dan pendidikan di Kashgar juga menyatakan bahwa beberapa teman sesama pelatihannya yang dulu hanya berada di rumah sekarang telah memiliki pekerjaan, sementara yang lain memulai bisnis mereka sendiri seperti dirinya yang juga membangun bisnis restoran keluarga dan mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada sesama teman pelatihannya dahulu.

Dalam publikasi *White Paper* yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara mengenai Perlawanan terhadap Terorisme dan Ekstremisme dan Perlindungan HAM di Xinjiang pada Maret 2019 dijelaskan bahwa Xinjiang telah fokus memastikan dan meningkatkan standar hidup masyarakat dan melaksanakan proyek-proyek bermanfaat bagi publik dalam pekerjaan, pendidikan, perawatan medis, jaminan sosial, dan bidang lainnya (The State Council Information Office, 2019).

Upaya Eksternal

***Shanghai Cooperation Organisation* (SCO)**

Organisasi SCO ini terbentuk pada tahun 2001 beranggotakan Cina, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India, dan Pakistan. Beberapa negara juga terdaftar sebagai negara *observer*/pengamat, seperti Mongolia, Iran, Afghanistan, dan Belarus. Selain itu, SCO juga memiliki Mitra Dialog yaitu Sri Lanka, Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Nepal, dan Turki (Shanghai Cooperation Organisation Secretariat, 2017)

Sebagian besar upaya Cina dalam kerja sama kontra-terorisme multilateral telah dilakukan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tengah melalui SCO (Tanner dan Bellacqua, 2016). Di bawah kerangka SCO, Cina dan negara-negara yang terlibat telah menandatangani dokumen-dokumen berikut: Konvensi Shanghai tentang Pemberantasan Terorisme, Separatisme dan Ekstremisme; Kerja Sama antara Negara-negara Anggota SCO tentang Memerangi Terorisme, Separatisme dan Ekstremisme; Konvensi SCO tentang Memerangi Terorisme; Konvensi SCO tentang Memerangi Ekstremisme; Program Kerja Sama SCO dalam Memerangi Terorisme, Separatisme dan Ekstremisme untuk 2019-2021, dan; Rencana Aksi SCO untuk Kerjasama dengan Republik Islam Afghanistan tentang Penanggulangan Terorisme, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Terorganisir.

Dalam Konvensi Shanghai tentang Pemberantasan Terorisme, Separatisme, dan Ekstremisme yang dirilis dalam bahasa Cina dan Rusia pada 15 Juni 2001 oleh Para Pihak (Kazakhstan, Cina, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan), dijelaskan bahwa terdapat beberapa pasal yang mendukung upaya-upaya kontra-terorisme. Seperti yang diuraikan dalam Pasal 2 Ayat 1-2 bahwa Para Pihak setuju untuk bekerja sama dalam bidang pencegahan, pencarian, dan penindasan atas tindakan terorisme, separatisme, dan ekstremisme dan akan bersedia melakukan kerja sama ekstradisi (United Nations, 2008).

Lalu dalam Pasal 6 juga diuraikan 10 cara dalam melaksanakan kerja sama dan memberikan bantuan satu sama lain, seperti pertukaran informasi, pelatihan, serta pencegahan pembiayaan, persediaan senjata, dan amunisi. Sedangkan dalam Pasal 7

diuraikan mengenai informasi apa saja yang harus dibagi untuk kepentingan bersama seperti informasi mengenai organisasi, kelompok, dan invididu yang menyiapkan dan/atau melakukan tindakan terorisme, separatisme, dan ekstremisme, serta informasi mengenai pembuatan atau pemindahan dan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan senjata-senjata yang dapat mendukung perbuatan terorisme, separatisme, dan ekstremisme (United Nations, 2008).

Dalam kerangka SCO, Cina berasumsi bahwa mereka mampu mengandalkan dukungan dari negara-negara anggota dan juga negara-negara pengamat lainnya dalam kampanye melawan ETIM. Selain itu, Cina juga mampu menarik dukungan dari mitra SCO dalam upayanya untuk menggagalkan ancaman keamanan konvensional maupun non-konvensional serta mampu untuk menghilangkan atau mengurangi faktor eksternal gangguan terhadap stabilitas negaranya (Guang dalam Bailes dan Dunay, 2007).

Beijing juga menjadi instrumen dalam membentuk *Regional Anti-Terrorist Structure*/Struktur Anti-terorisme Regional (RATS), yang merupakan pusat utama kontra-terorisme dari SCO (Tanner dan Bellacqua, 2016). Kegiatan RATS berkembang dalam beberapa arah operasional yang jelas seperti; perencanaan bank data bersama tentang organisasi teroris, separatis, dan ekstremis, baik itu mengenai struktur, pemimpin, anggota, jaringan operasional, maupun sumber finansialnya; berkontribusi pada pelatihan komando; dan membantu menyusun dokumen hukum internasional tentang perang melawan terorisme (Bailes dan Dunay, 2007). Pada April 2006 dalam pertemuan Dewan RATS, para anggota SCO memasukkan ETIM bersama dengan Al Qaeda, IMU, dan Hizbut Tahrir sebagai organisasi *three evils* yang aktivitasnya dilarang di dalam wilayah negara anggota SCO. Selain itu, RATS juga mengesahkan daftar mengenai individu yang dicari oleh layanan khusus dan badan penegak hukum negara anggota SCO yang telah melakukan atau diduga melakukan kejahatan teroris, separatis, ataupun ekstremis. Daftar tersebut berisikan 400 nama (Troitskiy dalam Bailes dan Dunay, 2007).

Pada tahun 2017 dilaporkan bahwa SCO telah menggagalkan 600 plot teror dan mengekstradisi 500 teroris melalui RATS (Desai, thediplomat.com/2017/12/indias-sco-challenge/, diakses 19 Juli 2019). Kemudian pada bulan Mei 2018, Pakistan menjadi tuan rumah pertemuan pertama para ahli hukum dan penasihat hukum RATS dari delapan negara anggota (termasuk India), untuk membahas ancaman teroris regional dan langkah-langkah untuk mengatasinya (IISS, 2018).

Negara anggota SCO juga memimpin sejumlah latihan kontra-terorisme, baik itu bilateral maupun multilateral di bawah kerangka kerja SCO (Tanner dan Bellacqua, 2016). Cina adalah negara yang paling sering menginisiasi banyak latihan kontra-terorisme dengan negara-negara Asia Tengah. Namun, perwakilan PLA dengan tegas menyatakan bahwa SCO bukan aliansi militer dan bahwa latihan dimaksudkan hanya untuk ancaman keamanan nontradisional (Wallace, 2014).

Mitra Cina yang paling sering berlatih dalam latihan gabungan adalah Rusia, yang telah berpartisipasi dalam 11 dari 35 latihan selama periode tahun 2002 hingga 2014. Unit-unit PLA dan PAP juga telah melakukan latihan kontra-terorisme dengan unit militer dan polisi dari negara-negara Asia Tengah, termasuk Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Latihan-latihan ini sering diselenggarakan di bawah naungan SCO dan diberi nama Latihan "Misi Perdamaian" (Tanner dan Bellacqua, 2016).

Latihan "Misi Perdamaian" ini mengajukan skenario yang melibatkan operasi kontra-terorisme yang menggunakan senjata berat. Pasukan berpartisipasi dalam operasi

simulasi untuk mengejar teroris, serangan balik dan menjatuhkan jaringan teroris, menguji kesiapan tempur mereka dan kecenderungan untuk kerjasama militer. KTT SCO pada tahun 2018 mengadopsi beberapa dokumen keamanan utama, salah satunya adalah Program 2019–21 untuk Kerjasama dalam Menentang Terorisme, Separatisme dan Ekstremisme. Latihan bersama dan operasi kontra-terorisme, serta fasilitasi pertukaran intelijen, adalah beberapa kegiatan utama SCO. Pada bulan September 2017, Cina dan Tajikistan secara resmi setuju untuk meningkatkan pembagian intelijen mereka.

Pada tahun 2019 SCO mengadakan latihan kontra-terorisme yang diberi nama "*Sary-Arka-Antiterror 2019*". Sebelumnya, pada tahun 2018, Cina melakukan latihan kontra-terorisme bersama dengan India yang mengambil lokasi di Chengdu. Latihan bersama ini dinamai "*Hand in Hand*" dan mencakup diskusi tentang berbagai aspek kontra-terorisme, seperti operasi barisan dan pencarian, penggerebekan tempat persembunyian teroris, pengumpulan intelijen dan operasi bersama (Srinagar, 2018) Selain itu, Cina juga pernah melakukan latihan kontra-terorisme bersama dengan Uzbekistan, antara PAP dengan *Uzbek National Guard* selama dua minggu pada Mei 2019 yang diberi nama "*Cooperation-2019*" di pangkalan pelatihan Forish di wilayah Jizzakh, Uzbekistan. Latihan ini telah meningkatkan kemampuan kedua pasukan untuk menghadapi ancaman dan tantangan baru, serta untuk memerangi terorisme dan ekstremisme internasional (Mingmei, 2019).

Kesimpulan

Berbagai faktor menyebabkan kekacauan di Xinjiang yang menuntun ke gerakan terorisme, yaitu faktor geografi, ekonomi, dan sosial. Semua faktor tersebut akhirnya memunculkan organisasi radikal, salah satunya adalah ETIM. Karena itulah Pemerintah Cina kemudian mengeluarkan upaya untuk mengatasi aksi-aksi terorisme. Untuk upaya internal, Pemerintah Cina mempertegas UU Pidana dan mengesahkan UU Kontra-terorisme; meningkatkan operasi penegakan hukum; bantuan dari masyarakat umum; mempromosikan persatuan etnis dan melawan ekstremisme religius; dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk upaya eksternal, Pemerintah Cina mendorong kerjasama internasional bersama SCO dalam hal penegakan hukum, melakukan pelatihan-pelatihan kontra-terorisme yang melibatkan pasukan militer dan kepolisian, dan juga melakukan perjanjian ekstradisi.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Cina, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut efektif, mengingat tidak terjadinya lagi pengeboman-pengeboman yang dilakukan oleh ETIM setelah tahun 2013, baik itu di dalam maupun di luar Cina. Intensitas serangan selain pengeboman yang dilakukan oleh ETIM juga cenderung menurun dibandingkan pada periode 2007-2014

Daftar Pustaka

Bailes, Alyson J. K. dan Pal Dunay. 2007. "The Shanghai Cooperation Organization as a regional security institution" dalam Alyson J. K. Bailes (dir.), *The Shanghai Cooperation Organization*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

Becquelin, Nicolas. 2004. "Criminalizing Ethnicity: Political Repression in Xinjiang", tersedia di http://www.hrichina.org/fs/view/downloadables/pdf/downloadable-resources/b1_Criminalizing1.2004.pdf.

Buckow, Johannes, Marc Julienne, dan Moritz Rudolf. 2015. "How the Chinese Government Fights Terrorism", tersedia di https://thediplomat.com/2015/06/how-the-chinese-government-fights-terrorism/.

Chen, Dingding. 2009. "China's Participation in the International Human Rights Regime: A State Identity Perspective". *Chinese Journal of International Politics*. Vol. 2 No. 3.

China Law Translate. 2015. "Counter-Terrorism Law (2015)", tersedia https://www.chinalawtranslate.com/en/%e5%8f%8d%e6%81%90%e6%80%96%e4%b8%bb%e4%b9%89%e6%b3%95-%ef%bc%882015%ef%bc%89/?tpedit=1.

Dautcher, Jay. 2004. "Public Health and Social Pathologies" dalam S. Frederick Starr (ed), *Xinjiang: China's Muslim Borderland*. Washington D.C.: Central Asia-Caucasus Institute.

Department of State. 2002. *Laporan Patterns of Global Terrorism 2001*. Washington D.C.: United States Department of State.

Doyon, Jerome. 2019. "'Counter-Extremism' in Xinjiang: Understanding China's Community-Focused Counter-Terrorism Tactics", tersedia di https://warontherocks.com/2019/01/counter-extremism-in-xinjiang-understanding-chinas-community-focused-counter-terrorism-tactics/.

Guang, Pan. 2007. "A Chinese perspective on the Shanghai Cooperation Organization" dalam Alyson J. K. Bailes (dir.), *The Shanghai Cooperation Organization*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

International Institute for Strategic Studies (IISS). 2018. "The Evolution of the Shanghai Cooperation Organisation". *Strategic Comments*. Vol. 24 No. 5.

Kaiman, Jonathan. 2013. "Islamist group claims responsibility for attack on China's Tiananmen Square", tersedia di https://www.theguardian.com/world/2013/nov/25/islamist-china-tiananmen-beijing-attack.

Laqueur, Walter. 1999. *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*. New York: Oxford University Press.

Lee, Joy R.. 2006. "The Islamic Republic of Eastern Turkestan and the Formation of Modern Uyghur Identity in Xinjiang". Manhattan: Department of History Kansas State University.

Mingmei. 2019. "Uzbekistan, China wrap up joint anti-terrror drills", tersedia di http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/16/c_138064037.htm.

Pantucci, Raffaello. 2010. "Uyghurs Convicted in East Turkestan Islamic Movement Plot in Dubai". *Terrorism Monitor*. Vol. VIII No. 29.

Rajagopalan, Megha. 2013. "China security chief blames Uighur Islamists for Tiananmen attack", tersedia di https://reuters.com/article/us-china-tiananmen/china-security-chief-blames-uighur-islamists-for-tiananmen-attack-idUSBRE9A003L20131101.

Reed, J. Todd dan Diana Raschke. 2010. *The ETIM: China's Islamic Militants and the Global Terrorist Threat*. California: Praeger.

Shanghai Cooperation Organisation Secretariat. 2017. "The Shanghai Cooperation Organisation", tersedia di http://eng.sectsco.org/about_sco/.

Srinagar. 2018. "7th anti-terrorism India-China military exercise ends", tersedia di https://www.business-standard.com/article/news-ians/7th-anti-terrorism-india-china-military-exercise-ends-118122200593_1.html.

Tanner, Murray Scot dan James Bellacqua. 2016. *China's Response to Terrorism*. Virginia: CNA Analysis & Solutions.

The State Council Information Office of the People's Republic of China. 2019. "The Fight Against Terrorism and Extremism and Human Rights Protection in Xinjiang", tersedia di http://english.scio.gov.cn/2019-03/19/content_74585093.htm.

Troitskiy, Mikhail. 2007. "A Russian perspective on the Shanghai Cooperation Organization" dalam Alyson J. K. Bailes (dir.), *The Shanghai Cooperation Organization*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

United Nations. 2008. "Shanghai convention on combating terrorism, separatism and extremism", dalam *International Instruments Related to the Prevention and Suppression of International Terrorism*. New York: United Nations.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. 2007. *International Relations and World Politics: Security, Economy, and Identity*. New Jersey: Pearson Education Inc.

Wallace, Thomas. 2014. "China and the Regional Counter-Terrorism Structure: An Organizational Analysis". *Asian Security*. Vol. 10 No. 3.

Wang, John Z.. 2003. "Eastern Islamic Movement: A Case Study of A New Terrorist Organization in China". *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. Vol. 47 No. 5.

Wayne, Martin I.. 2008. *China's War on Terror: Counter-insurgency, politics, and internal security*. New York: Routledge.

Wolfe, A. B.. 2014. "Conservatism and Radicalism: Some Definitions and Distinctions". *The Scientific Monthly*. Vol. 17 No. 3.

Wong-Tworek, Susan W.K.. 2015. "China's Economic Development Plan in Xinjiang and How it Affects Ethnic Instability". California: National Security Studies Naval Postgraduate School.

Wright, Teresa. 2001. *The Perils of Protest: State Repression and Student Activism in China and Taiwan*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Xu, Beina, Holly Fletcher, dan Jayshree Bajoria. 2014. "The East Turkestan Islamic Movement", tersedia di http://www.cfr.org/china/east-turkestan-islamic-movement-etim/p9179.

Yi, Zhang. 2016. "Beijing police reward terror whistle-blowers", tersedia di http://chinadaily.com.cn/en/2016-03/23/content_24052229.htm.